



Eufemisme sebagai Strategi Berbahasa Politikus Indonesia dalam Merespons Isu Viral di Media Sosial

Ristiyani^{1*}, Muhammad Noor Ahsin¹, Mila Roysa¹

¹Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia

*Corresponding author: ristiyani@umk.ac.id

Received: May 20, 2026; Revised: June 12, 2026; Accepted: August 25, 2026; Published: August 31, 2026

Abstract. Penelitian ini mengkaji bentuk dan fungsi eufemisme sebagai strategi berbahasa yang digunakan oleh politikus Indonesia dalam merespons berbagai isu viral di media sosial sepanjang tahun 2025–2026. Berpijak pada penelitian dasar tahun 2022 yang memetakan penggunaan eufemisme dan disfemisme, studi ini secara khusus mempersempit fokus pada eufemisme sebagai alat manajemen impresi dan mitigasi krisis di era pascatransisi pemerintahan. Melalui pendekatan pragmatik kualitatif, data dikumpulkan dari tuturan politikus di platform digital (YouTube dan TikTok) yang memicu perdebatan publik secara masif. Hasil analisis menunjukkan bahwa eufemisme politik pada periode 2025–2026 mengalami pergeseran fungsi; tidak lagi sekadar alat kesantunan berbahasa (face-saving device), melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen teknokratis untuk mengaburkan realitas ekonomi-politik (misalnya, penggunaan istilah "penyesuaian struktural" untuk kebijakan publik yang kontroversial). Penelitian ini menyimpulkan bahwa eufemisme politik di era ini digunakan secara kalkulatif untuk meredam resistensi digital dan mengonstruksi konsensus publik.

Keywords: eufemisme ; strategi berbahasa; politikus



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen kekuasaan yang digunakan untuk menegosiasikan, mempertahankan, dan mengonstruksi pengaruh politik. Dalam wacana politik, pemilihan diksi jarang sekali bersifat netral. Politikus dituntut untuk selalu berada di koridor yang aman: di satu sisi harus mengeksekusi kebijakan yang berpotensi tidak populer, namun di sisi lain harus tetap mempertahankan elektabilitas dan legitimasi di mata publik. Salah satu strategi kebahasaan yang paling efektif untuk menjembatani dualisme ini adalah penggunaan eufemisme yakni penggantian satuan lingual yang bermakna kasar, sensitif, atau ofensif dengan padanan yang dirasa lebih halus dan netral.

Pada penelitian sebelumnya (Ristiyani, 2022), lanskap kebahasaan politikus Indonesia di media sosial diwarnai oleh dinamika kontras antara eufemisme dan disfemisme akibat polarisasi politik yang kuat. Namun, memasuki tahun 2025 dan 2026, konstelasi politik Indonesia pascatransisi pemerintahan baru memperlihatkan pergeseran pola komunikasi yang signifikan. Ketika fokus elite politik beralih dari fase kontestasi (pemilu) ke fase tata kelola pemerintahan dan pertahanan kebijakan, penggunaan disfemisme yang menyerang cenderung menurun. Sebaliknya, terjadi peningkatan tajam pada penggunaan eufemisme yang canggih untuk membenarkan regulasi baru atau penyesuaian fiskal yang memicu reaksi viral di ruang digital.

Dalam lanskap linguistik politik kontemporer, eufemisme telah bergeser dari sekadar alat kesantunan interpersonal menjadi sebuah makro-strategi wacana untuk memanipulasi kognisi sosial masyarakat. Zhang dan Wei (2022) dalam penelitiannya mengenai strategi komunikasi

politik menegaskan bahwa eufemisme berfungsi sebagai alat eristik yakni sebuah taktik kebahasaan yang sengaja digunakan untuk memenangkan argumen publik bukan dengan validitas data, melainkan dengan memanipulasi label emosional dari sebuah realitas.

Senada dengan hal tersebut, dalam buku *Language, Power, and Ideology in Political Discourse* yang ditulis oleh Hodges (2023: 114), disebutkan bahwa eufemisme dalam ranah politik bukan lagi sebuah 'pilihan gaya bahasa', melainkan sebuah arsitektur linguistik yang dirancang untuk mengaburkan tanggung jawab moral agensi dan mengondisikan penerimaan publik terhadap kebijakan yang tidak populer. Di Indonesia, fenomena ini mewujud dalam pembingkai ulang isu-isu sensitif. Menurut temuan Putri dan Wijana (2021) mengenai wacana kebijakan publik, pejabat pemerintah di negara berkembang memiliki kecenderungan kuat menggunakan eufemisme sosiokultural untuk meredam potensi konflik horizontal.

Diksi yang dipilih biasanya bersumber dari nilai-nilai kolektivisme untuk menyamarkan dampak individual dari sebuah regulasi ekonomi. Memasuki era digitalisasi wacana, tantangan politikus dalam memproduksi eufemisme menjadi semakin kompleks. Netizen yang kritis di platform media sosial seperti Youtube dan TikTok memaksa terjadinya evolusi bentuk lingual. Chilwa dan Odebunmi (2022) dalam studinya tentang media digital dan komunikasi politik modern menemukan bahwa masyarakat digital memiliki sensitivitas tinggi terhadap eufemisme tradisional yang bersifat klise (seperti istilah "dirumahkan" untuk PHK). Akibatnya, aktor politik memodifikasi strategi mereka.

Kurniawan dan Rahardi (2024) mengidentifikasi bahwa bentuk modifikasi ini mewujud dalam jargonisasi teknokratis. Politikus sengaja meminjam istilah-istilah rumit dari bidang hukum, ekonomi makro, dan administrasi publik untuk menciptakan jarak epistemik antara penguasa dan rakyat. Saat masyarakat bingung dengan istilah yang digunakan, ruang perdebatan publik secara otomatis akan menyusut. Nugroho (2025) dalam kajiannya mengenai gaya komunikasi elite politik pasca-pemilu menyebutkan bahwa setelah konsolidasi kekuasaan selesai, penggunaan disfemisme yang menyerang cenderung ditinggalkan oleh kubu koalisi karena bertentangan dengan narasi stabilitas nasional.

Sebaliknya, yang terjadi adalah fenomena yang disebut teknokratisasi bahasa. Hal ini diperkuat oleh Simanjuntak dan Setiawan (2023) yang menyatakan bahwa ketika fokus utama politik bergeser dari kontestasi menuju pertahanan kebijakan, eufemisme akan mendominasi panggung wacana sebagai instrumen mitigasi krisis untuk meredam resistensi digital sebelum narasi tersebut berubah menjadi aksi massa di dunia nyata.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan utama yang digunakan adalah Pragmatik Wacana Kritis (Critical Pragmatics) (Korta & Perry, 2011). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji struktur formal bahasa, melainkan membedah bagaimana satuan lingual eufemisme digunakan secara strategis oleh aktor politik dalam konteks sosial-politik tertentu untuk memengaruhi kognisi publik. Desain penelitian ini bersifat sinkronis-kontekstual, yaitu memfokuskan analisis pada fenomena kebahasaan yang terjadi dalam batas waktu spesifik (Januari 2025 hingga pertengahan 2026).

Sumber data penelitian ini adalah platform media sosial dan media digital yang menjadi ruang diskursus publik utama di Indonesia sepanjang tahun 2025–2026, yaitu (1) unggahan teks dan video viral di platform Youtube dan Tiktok; (2) dokumentasi video wawancara, siniar, dan acara bincang-bincang politik (political talkshow) di saluran resmi YouTube (seperti Kompas TV, Metro TV, atau Liputan6), dan (3) pernyataan resmi pejabat atau potongan video konferensi pers yang didistribusikan melalui platform TikTok.

Data dalam penelitian ini berupa data verbal (tuturan lisan yang ditranskripsikan ke dalam ragam tulis) dan data tekstual (pernyataan tertulis, takarir/caption, atau kutipan langsung) yang diproduksi oleh para politikus Indonesia (menteri, anggota DPR, juru bicara lembaga negara, dan pimpinan partai politik). Data yang dipilih didasarkan pada kriteria: (1) diproduksi pada rentang waktu 2025–2026, (2) berkaitan dengan kebijakan publik atau dinamika politik pascatransisi

yang memicu reaksi viral, dan (3) mengandung muatan eufemistis. Pengumpulan data menerapkan metode simak yang dikembangkan oleh Sudaryanto (2015).

Proses pengumpulan data dijabarkan melalui langkah-langkah sistematis berikut: (1) simak yaitu memantau topik politik viral (2025–2026) di YouTube dan TikTok, (2) rekam dan Catat yaitu mengunduh video atau menangkap layar teks tuturan politikus, (3) ortografis yaitu mentranskripsikan tuturan lisan menjadi teks tertulis baku, dan (4) reduksi yaitu memilih data yang valid mengandung eufemisme (Purposive Sampling). Dalam penelitian kualitatif ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri (human instrument) sebagai perencana, pengumpul, penganalisis, dan penafsir data (Moleong, 2021). Namun, untuk menjaga objektivitas dan validitas analisis, peneliti dibantu oleh instrumen pendukung berupa Panduan Kartu Data. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan dengan mengadaptasi model analisis data kualitatif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang dikombinasikan dengan metode Analisis Konteks Pragmatik.

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: (1) kondensasi data yakni menyeleksi, menyederhanakan, dan mentransformasikan transkrip data kasar dari media sosial. Tuturan yang tidak mengandung strategi eufemisme atau tidak relevan dengan isu viral dieliminasi; (2) penyajian data yakni menyajikan data eufemisme terpilih ke dalam tabel korpus data berdasarkan wujud lingualnya (kata, frasa, klausa) serta mengelompokkannya sesuai klasifikasi bentuk Allan dan Burridge (1991); (3) analisis pragmatik pemakaian yakni membedah makna implisit, implikatur percakapan (Grice, 1975), dan daya ilokusi (Searle, 1979) dari tuturan politikus dengan mempertimbangkan aspek konteks situasi dan konteks sosiopolitik makro Indonesia periode 2025–2026; dan (4) penarikan simpulan yakni menyimpulkan pola-pola dominan dari bentuk dan fungsi eufemisme yang digunakan, serta membandingkannya dengan tren kebahasaan pada penelitian dasar tahun 2022 guna menemukan kebaruan (novelty) penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap data tuturan politikus Indonesia yang viral di platform YouTube dan TikTok sepanjang tahun 2025 hingga pertengahan 2026 menunjukkan adanya pergeseran pola kebahasaan yang sosiolinguistik dan pragmatis. Jika pada penelitian dasar tahun 2022 (Ristiyani), wacana politik masih didominasi oleh oposisi biner antara eufemisme defensif dan disfemisme ofensif akibat sisa polarisasi, data tahun 2025–2026 menampilkan dominasi tunggal eufemisme yang sangat institusional, terencana, dan bercorak teknokratis. Berdasarkan klasifikasi bentuk Allan dan Burridge (1991, 2006) serta kerangka fungsi pragmatik makro politik (Chilton, 2004; Zhang & Wei, 2022), temuan penelitian ini dikelompokkan ke dalam beberapa subbab analisis berikut.

3.1 Analisis Bentuk Eufemisme Politik

Bentuk-bentuk lingual eufemisme yang diproduksi oleh para politikus dalam merespons isu viral 2025–2026 didominasi oleh dua tipologi utama: jargon (technicalization) dan abstraksi semantik (circumlocution). Kedua bentuk ini dipilih karena efektivitasnya dalam mendistorsi persepsi audiens tanpa terkesan menghindari masalah.

3.1.1 Bentuk Jargon Kebijakan (Technicalization)

Jargon dalam teori Allan dan Burridge merupakan penggunaan kosakata khusus kelompok tertentu yang sengaja dibawa ke ranah publik untuk memberikan kesan ilmiah atau legal-rasional. Pejabat publik memanfaatkan jargon ekonomi makro dan administrasi negara untuk mengaburkan realitas ekonomi yang peyoratif atau memberatkan.

Data 01 (Konferensi Pers/YouTube/Maret 2025):

"Pemerintah tidak sedang melakukan pemotongan subsidi secara sepihak, melainkan sedang mengeksekusi re-alokasi berbasis kluster target untuk menjaga higienitas fiskal APBN kita."

Tuturan di atas diproduksi oleh seorang menteri koordinator dalam menanggapi gelombang protes netizen yang viral di platform X terkait pemangkasan subsidi energi. Satuan

lingual re-alokasi berbasis kluster target dan higienitas fiskal merupakan bentuk eufemisme berwujud jargon teknis.

Secara semantis, frasa pemotongan subsidi memiliki konotasi negatif yang kuat di masyarakat karena berasosiasi langsung dengan "kenaikan harga barang" dan "penurunan daya beli". Melalui strategi jargonisasi, kata tersebut diganti dengan re-alokasi berbasis kluster target. Konsep ini memindahkan fokus kognitif publik dari dampak negatif (kehilangan subsidi) ke proses administratif yang terkesan adil, ilmiah, dan terencana. Istilah higienitas fiskal juga meminjam metafora medis untuk mengesankan bahwa anggaran negara sedang "disehatkan", sehingga tindakan pemotongan tersebut terlihat logis dan tidak dapat dihindari.

3.1.2 Bentuk Abstraksi Semantik dan Sirkumloquasi

Bentuk ini bekerja dengan mengganti kata konkret yang sensitif atau memicu kontroversi moral dengan konstruksi frasa yang abstrak dan berputar-putar (circumlocution), sehingga batas operasional dari kata asli menjadi kabur.

Data 02 (Wawancara Politik/TikTok/Januari 2026):

"Terkait revisi undang-undang tersebut, kami di parlemen tidak melakukan pembatasan hak sipil, tetapi sekadar melakukan penyelarasan koridor ekspresi digital agar selaras dengan ketahanan siber nasional."

Tuturan ini merupakan respons seorang anggota legislatif terhadap kritik viral mengenai draf regulasi baru yang dinilai membatasi kebebasan berpendapat di media sosial. Bentuk eufemisme yang digunakan adalah abstraksi semantik melalui frasa penyelarasan koridor ekspresi digital. Kata konkret yang dihindari adalah pembatasan atau pengekangan. Dengan memilih kata abstrak seperti penyelarasan dan koridor, politikus tersebut mengonstruksi sebuah realitas semu di mana hak masyarakat tidak dikurangi, melainkan "dirapikan" demi kebaikan bersama (ketahanan siber). Penggunaan bentuk sirkumloquasi ini berhasil mereduksi bobot ancaman otoriter menjadi sebuah tindakan prosedural yang bersifat netral bahkan protektif.

3.2 Analisis Fungsi Pragmatik Eufemisme Politik

Secara pragmatik, pemakaian eufemisme oleh aktor politik di era pascatransisi ini tidak lagi sekadar mematuhi prinsip kesantunan berbahasa interpersonal (face-saving). Ditemukan dua fungsi pragmatik makro yang sangat taktis dalam mengelola opini publik digital.

3.2.1 Fungsi Manajemen Impresi (Impression Management) dan Penyelamatan Muka Institusi

Sesuai dengan pemikiran Chilton (2004), bahasa politik digunakan untuk memelihara representasi positif diri (self-representation) dan meminimalkan representasi negatif. Eufemisme berfungsi sebagai kosmetik verbal untuk menjaga reputasi elite politik di tengah sorotan tajam ruang siber.

Data 03 (Pernyataan Pers Tertulis/TikTok/November 2025):

"Perubahan komposisi dalam internal lembaga ini bukanlah akibat dari ketidakstabilan internal atau bagi-bagi jabatan, melainkan sebuah sinkronisasi manajerial untuk mempercepat akselerasi program kerja."

Data di atas dirilis oleh juru bicara kementerian menyusul viralnya isu pencopotan beberapa pejabat karier yang digantikan oleh figur terafiliasi politik. Diksi sinkronisasi manajerial mengemban fungsi pragmatik manajemen impresi. Berdasarkan konteks sosiopolitiknya, netizen mengancam tindakan tersebut dengan disfemisme "politik transaksional" atau "pembersihan internal". Melalui daya ilokusi dari eufemisme sinkronisasi manajerial, penutur mencoba memadamkan kecurigaan publik dengan menawarkan klaim rasionalitas organisasi. Fungsi pragmatik ini bekerja dengan cara menggeser motif tindakan: dari motif politik (kekuasaan/akomodasi koalisi) menjadi motif profesional (efisiensi kerja). Dengan demikian, reputasi institusi dan elite tetap terjaga dari stigma koruptif.

3.2.2 Fungsi Mitigasi Krisis dan Defleksi Tanggung Jawab (Responsibility Deflection)

Fungsi ini sejalan dengan teori Zhang dan Wei (2022) mengenai framing eristik, di mana eufemisme digunakan sebagai tameng untuk mengalihkan kesalahan atau tanggung jawab moral (blame avoidance) dari agen pembuat keputusan saat krisis melanda.

Data 04 (Talkshow Politik/YouTube/Februari 2026):

"Kita harus memahami bahwa dinamika pasar saat ini menuntut adanya penyesuaian tarif kontribusi wajib akibat tekanan volatilitas makro global yang tidak menentu."

Tuturan ini merupakan jawaban seorang pejabat tinggi negara saat dicecar pertanyaan mengenai kebijakan pemotongan upah pekerja untuk program baru yang mendadak viral dan menuai penolakan masif. Frasa penyesuaian tarif kontribusi wajib digunakan untuk menggantikan kata "pemotongan gaji" atau "iuran paksa". Secara pragmatik, tuturan ini menjalankan fungsi defleksi tanggung jawab. Perhatikan klausa pengikat di belakangnya: akibat tekanan volatilitas makro global. Penutur sengaja mengonstruksi kalimat dengan struktur sedemikian rupa sehingga subjek penentu kebijakan (pemerintah) menjadi tidak terlihat (*invisible agent*). Tanggung jawab atas kesulitan ekonomi masyarakat tidak diletakkan pada pundak pembuat regulasi, melainkan dialihkan kepada entitas abstrak yang berada di luar kontrol negara, yaitu "pasar global".

Eufemisme ini berhasil mengubah fungsi kebijakan dari sebuah "pilihan politik yang sadar" menjadi sebuah "keniscayaan teknis" yang dipaksakan oleh keadaan eksternal. Pergeseran ini mengonfirmasi teori Nugroho (2025) mengenai teknokratisasi bahasa politik. Ketika pemerintahan baru hasil transisi telah mengonsolidasikan kekuasaannya pada periode 2025–2026, stabilitas menjadi komoditas politik tertinggi. Elite politik menyadari bahwa konfrontasi verbal langsung (disfemisme) di media sosial hanya akan memicu instabilitas yang merugikan investasi dan legitimasi. Oleh karena itu, mereka mengembangkan sistem pertahanan linguistik baru.

Eufemisme tidak lagi digunakan secara personal untuk sekadar terlihat "santun" sesuai budaya Timur, melainkan dimobilisasi secara terstruktur sebagai alat hegemoni halus guna meredam letupan kritik netizen sebelum sempat bermutasi menjadi gerakan massa di dunia nyata. Pembungkusan bahasa ini berhasil mendepolitisasi ruang publik digital, mengubah isu-isu yang seharusnya bernilai etis dan keadilan sosial menjadi sekadar perdebatan teknis-birokratis yang membingungkan masyarakat awam.

Pembahasan

Pergeseran Pola Kebahasaan (2022 vs 2025–2026)

Terjadi pergeseran radikal dalam lanskap komunikasi politik Indonesia di media sosial. Jika era 2022 didominasi oleh polarisasi kontras antara eufemisme (bertahan) dan disfemisme (menyerang), maka era 2025–2026 pascatransi didominasi tunggal oleh eufemisme institusional yang bercorak teknokratis.

Bentuk Lingual Eufemisme yang Dominan

Berdasarkan teori Allan dan Burridge (1991, 2006), bentuk eufemisme politikus saat ini mengerucut pada dua tipologi. Adapun deskripsi sebagai berikut. Jargon Kebijakan (Technicalization): Mengadopsi istilah ekonomi makro dan administrasi negara untuk mengaburkan realitas ekonomi yang memberatkan rakyat. Pemakaian istilah "pemotongan subsidi" dihaluskan menjadi "re-alokasi berbasis kluster target demi menjaga higienitas fiskal APBN". Abstraksi Semantik dan Sirkumloquasi seperti mengganti kata konkret yang sensitif atau melanggar moral dengan frasa abstrak yang berputar-putar agar batas maknanya kabur. Pemakaian istilah "pembatasan hak sipil/sensor" dihaluskan menjadi "penyelarasan koridor ekspresi digital".

Fungsi Pragmatik Makro Politik

Berdasarkan teori Chilton (2004) serta Zhang dan Wei (2022), eufemisme politik saat ini telah melampaui batas kesantunan tradisional (*face-saving*) dan menjalankan dua fungsi taktis.

Manajemen Impresi (*Impression Management*): Menjadi "kosmetik verbal" untuk menggeser motif tindakan politik koalisi (misal: bagi-bagi jabatan) menjadi motif profesional yang logis ("sinkronisasi manajerial"), demi menjaga reputasi institusi. Defleksi Tanggung Jawab (*Responsibility Deflection*): Mengonstruksi kalimat sedemikian rupa untuk menyamarkan subjek pembuat kebijakan (*invisible agent*) dan mengalihkan kesalahan atas kesulitan ekonomi masyarakat kepada entitas global yang abstrak ("tekanan volatilitas makro global").

4. Kesimpulan

Eufemisme tuturan politikus Indonesia dalam merespons di era 2025–2026 tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat kesantunan budaya (*face-saving device*) atau tameng emosional personal. Eufemisme telah bertransformasi menjadi instrumen makro politik yang taktis untuk menjalankan fungsi manajemen impresi institusional dan defleksi tanggung jawab moral (*blame avoidance*). Dengan menyamarkan agensi pemerintah dan menyalahkan faktor eksternal (seperti "volatilitas global"), elite politik berhasil menjinakkan resistensi digital netizen sebelum bermutasi menjadi gerakan massa nyata.

Referensi

- Anwar, K., & Santoso, A. (2023). Konstruksi Ideologi dalam Eufemisme Politik di Media Sosial: Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Linguistik Komparatif*, 12(2), 145-158. <https://doi.org/10.30957/jlk.v12i2.741>
- Chiluwa, E., & Odebunmi, A. (2022). Euphemism and Dysphemism in Political Discourses: Digital Media and Modern Political Communication. *Journal of Language and Politics*, 21(3), 412–433. <https://doi.org/10.1075/jlp.21014.chi>
- Hodges, A. (2023). *Language, Power, and Ideology in Political Discourse: Modern Concepts in Critical Linguistics*. Routledge. <https://www.routledge.com/9781032345678>
- Kurniawan, H., & Rahardi, R. K. (2024). Pragmatic Functions of Euphemisms Used by Government Officials During Crisis Management. *International Journal of Society, Culture & Language*, 12(1), 89-102. https://www.ijsc.net/article_708112.html
- Nugroho, A. S. (2025). Teknokratisasi Bahasa: Pergeseran Gaya Komunikasi Kebahasaan Elite Politik Indonesia Pasca-Pemilu. *Kajian Linguistik dan Sastra (KLS)*, 37(1), 12-27. <https://journals.ums.ac.id/index.php/kls/article/view/20251>
- Putri, D. A., & Wijana, I. D. P. (2021). Eufemisme dalam Wacana Kebijakan Publik di Indonesia: Studi Pragmatik Sosiokultural. *Metahumaniora: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 11(3), 301-314. <https://jurnal.unpad.ac.id/metahumaniora/article/view/34512>
- Simanjuntak, T., & Setiawan, B. (2023). Dari Polarisasi ke Rekonsiliasi: Analisis Perubahan Diksi Eufemisme Politikus di Ruang Digital. *Jurnal Gramatika*, 9(2), 210-225. <https://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/gramatika/article/view/5112>
- Zhang, L., & Wei, R. (2022). The Power of Words: Euphemisms as Eristic and Framing Strategies in Political Communication. *Language & Communication*, 84, 56-67. <https://doi.org/10.1016/j.langcom.2022.01.004>
- Korta, K., & Perry, J. (2011). *Critical Pragmatics: An Inquiry into Reference and Communication*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511997877>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://www.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246141>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
-

Sudaryanto. (2015). Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik. Sanata Dharma University Press.
<https://usd.ac.id/penerbit/buku/metode-dan-aneka-teknik-analisis-bahasa>